

Pengendalian Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2019

Nur Fitria Handayani ¹

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹

Email: fitriahandayani359@gmail.com

INFO ARTIKEL

Volume 4
Nomor 3
Bulan Maret
Tahun 2022
Halaman 142-147

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian pengelolaan dana kapitasi di Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Puskesmas Pasrujambe berpedoman dengan petunjuk teknis penggunaan dana kapitasi dikarenakan puskesmas tidak termasuk daerah non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Puskesmas, Bendahara Penerimaan, Akuntan dan Bendahara Pengeluaran yang ada pada Puskesmas Pasrujambe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pengelolaan ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Penerapan pengendalian pengelolaan dana kapitasi ini cukup baik tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi maka puskesmas harus bisa menangani hambatan tersebut.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pengelolaan Dana Kapitasi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the control of the management of capitation funds at the Public health center Pasrujambe, Lumajang Regency. Pasrujambe Public health center is guided by technical guidelines for the use of capitation funds because Public health center are not intended as a non-BLUD area (Regional Public Service Agency). The method used in this study is a qualitative method in which data collection uses interview and documentation techniques. In this study the authors conducted interviews with the Head of the Public health center, Treasurer of Receipt, Accountant and Treasurer of Expenditures in the Pasrujambe Health Center. The results of this study indicate that management control consists of various stages, namely: the planning stage, the implementation phase, and the accountability stage. The implementation of capitation fund management control is quite good but there are some obstacles that occur so the puskesmas must be able to handle these obstacles.

Keywords: Internal Control, Management of Capitation Funds.

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak setiap manusia yang harus dimiliki, karena kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan manusia maka pemerintah mengutamakan tentang pelayanan kesehatan dengan membuat program-program salah satunya yaitu jaminan sosial kesehatan atau jaminan kesehatan nasional (JKN). Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) pada 1 Januari tahun 2014 yang telah diikuti oleh peraturan perundang-undangan sebagai pelindung hukum atau payung hukum. Cara kerja BPJS yaitu setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS kesehatan dan semua anggota akan ditarik iuran berdasarkan kelas yang sudah dipilih. Salah satu tugas BPJS kesehatan yaitu membayar pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) dan menerapkan semua kendali mutu dan biaya dengan aturan pengelolaan dokumen yang telah diklaim oleh FTKP.

Pengendalian adalah sesuatu yang harus digunakan untuk mengatur keuangan agar sesuai dengan peraturan yang ada dan harus bersifat transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya pengendalian dalam organisasi maka akan mengurangi resiko yang akan datang dimasa depan. Menurut (Bodnar & Howood, 2006) "Pengendalian adalah berguna untuk mengurangi eksposur terhadap resiko, eksposur disini adalah risiko yang di konsekuensi atas finansial resiko tersebut Gap analysis atau pernyataan kesenjangan (orisinalitas) atau kebaruan (novelty statement) atau beda unik penelitian ini di banding penelitian-penelitian sebelumnya, juga dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut dilakukan. Dana kapitasi merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS setiap bulan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar jumlah peserta BPJS yang terdaftar di FKTP. Dana kapitasi akan digunakan sebagai operasional puskesmas, pembayaran gaji karyawan, obat dan sarana prasarana puskesmas. Menurut Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) yaitu "Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan".

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pasrujambe karena alur pengendalian pengelolaan internal dana kapitasi perlu dianalisis sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sesuai juknis yang dibuat oleh masing-masing daerah. Tentang perencanaan, proses dan penerapan anggaran yang akan diterima setiap FKTP kepada BPJS Kesehatan. Puskesmas Pasrujambe kabupaten Lumajang tidak berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu bisa dilihat oleh FTKP yang mengklaim dana kapitasi kepada dinas kesehatan kabupaten Lumajang tidak langsung mengklaim kepada BPJS kesehatan. Sedangkan puskesmas yang berstatus BLUD itu mengklaim dana kapitasi langsung kepada BPJS. Dana diterima oleh puskesmas dan dikelola secara mandiri hal itu memungkinkan adanya penyalahgunaan dana kapitasi tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengendalian Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang periode tahun 2019"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. karena data yang digunakan tentang pengendalian pengelolaan dana kapitasi pada Puskesmas Pasrujambe Kabupaten Lumajang periode tahun 2019. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini tidak bisa diuraikan dalam bentuk angka (kuantitatif) sehingga harus dilakukan dengan metode deskriptif

Adapun penelitian ini menggunakan objek pengendalian pengelolaan dana kapitasi yang diberikan oleh BPJS kepada puskesmas sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan dana kapitasi JKN nomor : 445/2450/427.55/2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Sumber data penelitian ini berasal dari data internal berupa laporan tentang Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Kapitasi Puskesmas Pasrujambe. Laporan tersebut berupa RKA (Rencana Kerja

dan Anggaran) atau LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tentang pengeluaran dana yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data disederhanakan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama: mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, maupun dokumentasi, yang bersumber dari buku, literatur, dan foto.
2. Tahapan Kedua: mengklasifikasikan data yang masuk, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
3. Tahapan Ketiga: melakukan interpretatif terhadap faktor yang mempengaruhi dengan permasalahan yang ada.

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, Puskesmas Pasrujambe menerima dana kapitasi setiap bulannya pada bulan ke 3 tetapi apabila terlambat maka akan cair bulan berikutnya. yang melalui dinas kesehatan kabupaten Lumajang ke rekening Puskesmas Pasrujambe Pada tahun 2019 Puskesmas Pasrujambe menerima dana sebesar Rp. 820.343.000,- yang akan dialokasikan untuk jasa pelayanan 60% dan jasa sarana dan prasarana 40% di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Setiap bulannya Puskesmas Pasrujambe menerima dana kapitasi dengan jumlah yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah peserta yang membayar iuran kepada BPJS tidak tetap. Rata-rata Puskesmas Pasrujambe menerima dana sebesar Rp. 70.000.000,- per bulan. Sebagai contoh pada bulan Januari puskesmas menerima dana sebesar Rp. 64.297.000 dan untuk bulan Februari menerima dana kapitasi sebesar Rp. 77.527.000,- dan bulan Maret menerima dana sebesar Rp. 76.957.000,-. Hal ini menyebabkan naik turunnya jasa pelayanan yang diperoleh dari dana kapitasi di Puskesmas Pasrujambe dan anggaran belanja operasional puskesmas.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Puskesmas Pasrujambe ini dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana kapitasi tersebut maka Puskesmas Pasrujambe akan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang sudah digunakan dan mencatat setiap adanya transaksi keluar/masuk dana akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang biasanya dibahas pada rapat bulanan.

No	Keterangan	PERMENKES 21 Tahun 2016	NO. Petunjuk Teknis Kabupaten Lumajang 2017	Penerapan di Puskesmas Pasrujambe
¹	Jasa Pelayanan	> 60%	60%	60%
2.	Jasa sarana dan prasarana	< 40%	40% (dikelolah oleh Dinas Kesehatan)	40% (Dikelolah Dinas Kesehatan Lumajang)
	1. Belanja obat dan alat kesehatan			
	2. Bahan medis habis pakai			
	3. Pemenuhan operasional lainnya			

3 Pemanfaatan sisa DanaKapitasi	1. Dimanfaatkan untuk anggaran periode berikutnya 2. Sisa dana dari jasapelayanan hanya dimanfaatkan untuk jasa pelayanan 3. Sisa dana biaya operasional handa dimanfaatkan untuk biaya operasional	1. Dimanfaatkan untuk anggaran periode berikutnya 2. Sisa dana dari jasa pelayanan hanya dimanfaatkan untuk jasa pelayanan 3. Sisa dana biaya operasional handa dimanfaatkan untuk biaya operasional	Sudah memanfaatkan sisa dana untuk periode berikutnya
---------------------------------	---	--	---

Tabel 1.1

Kesesuaian Permenkes No 21 Tahun 2016, Petunjuk Teknis Dana Kapitasi Kabupaten Lumajang dengan Penerapan di Puskesmas Pasrujambe

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dinyatakan bahwa dalam pengelolaan dana kapitasi ini, terdapat dua aspek yang terkait yaitu jasa pelayanan yang dikelolah oleh Puskesmas Pasrujambe dan jasa sarana prasarana yang dikelolah oleh dinas kesehatan kabupaten Lumajang, Itu karena puskesmas Pasrujambe bukan termasuk daerah non BLUD. Dana Kapitasi sendiri adalah suatu besaran dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan setiap bulan kepada FTKP tanpa mmperhitungkan jasa pelayanan kesehatan yang telah diterima. Dana yang sudah diberikan kepada FTKP akan dikelolah sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Petunjuk Teknis Kabupaten Lumajang berpedoman dengan PERMENKES No 21 Tahun 2016. Secara luas PERMENKES ini mengatur seluruh Pengelolaan dana Kapitasi daerah *non* BLUD dan daerah BLUD. Sedangkan di Kabupaten Lumajang belum termaksud daerah BLUD jadi untuk mengelolah dana kapitasi di kabupaten Lumajang menggunakan Petunjuk Teknis yang menetapkan jasa pelayanan 60% dan jasa sarana prasarana 40% pembagian itu sesuai dengan petunjuk teknis.

Dan penerapan di Puskesmas Pasrujambe menetapkan 60% untuk jasa pelayan dan sisanya 40% untuk sarana prasarana yang dikelolah oleh Dinas Kesehatan meskipun 40% dikelolah dinas kesahatan setiap bulanya Dinas kesehatan melaporkan pengeluaran dan dana 40% tersebut dan apabila ada sisa pada jasa sarana prasaarana dinas kesehatan memanfaatkan sisa dana tersebut untuk periode berikutnya. Berdasarkan hasil analisis data yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dana kapitasi di Puskesmas Pasrujambe pada tahun 2019 dalam tahap pengendalian pengelolaan dana kapitasi setiap bulannya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pencataan atas setiap transaksi, pelaporan yang dilakukan tepat waktu, bukti-bukti fisik yang tertata dan tersusun dengan rapi atas setiap pengeluarannya. Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi sudah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera didalam peraturan Petunjuk Teknis penggunaan dana kapitasi JKN nomor : 445/2450/427.55/2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan menggunakan Tahapan pengendalian pengelolaan terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawabkan.

Tetapi Puskesmas Pasrujambe belum berstatus *non* BLUD dan dana kapitasi setiap bulannya dialokasikan 60% itu untuk alokasi pembayaran jasa pelayanan yang sudah diatur pembagiannya oleh Petunjuk Teknis Kabupaten Lumajang dan harus dihabiskan pada bulan itu untuk membayar jasa pelayanan. Dan 40% dikelolah Dinas Kesehatan untuk alokasi dukungan biaya operasional

pelayanan kesehatan jadi puskesmas yang berstatus *non* BLUD tinggal mengklaim obat dan peralatan sarana dan prasarana kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Sehingga puskesmas tidak bisa melakukan pengendalian pengeluaran dana kapitasi sepenuhnya. Penggunaan Dana Kapitasi pada Puskesmas Pasrujambe melaksanakan pengendalian internal dengan melibatkan bendahara penerimaan, akuntan, bendahara pengeluaran dan Kepala Puskesmas untuk mengatur dana kapitasi. Di dalam anggaran dan realisasi harus sesuai perencanaan yang ada. pada biaya operasional mengalami kekurangan anggaran itu dibuktikan oleh realisasi yang diberikan dinas kesehatan pada tahun 2019.

Hambatan dari pengelolaan dana kapitasi dipuskesmas Pasrujambe ini yaitu tidak rutinnya peserta BPJS membayar iuran sesuai tanggal yang sudah ditetapkan yang menyebabkan kendala terhadap cairnya dana yang turun ke puskesmas dan kota Lumajang ini tidak termasuk daerah *non* BLUD (Badan layanan Umum Daerah) yang menyebabkan dana tersebut tidak turun langsung kepada puskesmas Pasrujambe dan puskesmas lainnya

KESIMPULAN

Penerapan pengendalian pengelolaan dana kapitasi ini cukup baik. Pengendalian pengelolaan ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Terdapat hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana kapitasi diantaranya tidak rutinnya peserta BPJS membayar iuran sesuai tanggal yang sudah ditetapkan yang menyebabkan kendala terhadap cairnya dana yang turun ke puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, E. H., & Tjaraka, H. (2018). Lingkungan Pengendalian Pengelolaan Dana Kapitasi di Puskesmas Tanjung Selor Kalimantan Utara. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 275. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5224>
- Arivatul, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Malang, U. M. (2019). Analisis pengelolaan dana kapitasi bpjs pada puskesmas donomulyo skripsi.
- Bodnar, G. H., & Howood, W. S. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi* (D. Prabantini (Ed.); 9th ed.). C.V Andi.
- Budiarto, W., & Kristiana, L. (2015). Pemanfaatan Dana Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Penyelenggaraan JKN (The Use Capitation Funds in the First Level Health Facility (FKTP) the Implementation JKN). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 18(4), 437–445. <https://media.neliti.com/media/publications/20970-ID-the-use-capitation-funds-in-the-first-level-health-facility-fktp-the-implementat.pdf>
- Diana, A., & Setiawati, L. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. C.V Andi Affset.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaL Pada Pemerintah*, 525–538.
- Eldayana, S., Wardiyah, A., & Samino, S. (2015). Hubungan Insentif Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dengan Motivasi Kerja Pegawai Puskesmas Metro Tahun 2014. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 9(2), 64–70.
- Fitrianeti, D., Waris, L., & Yulianti, A. (2017). Penganggaran dan Penerimaan Dana Kapitasi Program JKN di Daerah Terpencil Kabupaten Kepulauan Mentawai Implementation of Breaching And Acceptance Of Health Capitation Funds National Health Care Program In Remote Areas Of Distric Mentawai Islands. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 1(2), 92–101.
- GEORGE. (1930). Pengertian Pengendalian Internal. <http://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/pengertian-pengendalian-internal>
- Kemendriyan Kesehatan. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2017 Tentang Program Pendanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. *Kemendes RI*, 01(432), 1–7. <http://www.albayan.ae>

- Keuangan, K. (2016). Laporan Direktorat Jenderal Anggaran 2015.
- Kurniawan, F., Siswoyo, E., Mansur, F., Aisyah, W., Revelino, D., & GAdistin, W. (2016). Capitation Fund Management of National Health Insurance in Indonesia (MONITORING DAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA) Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan , Faculty of Medicine ,. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 05(September), 122– 131.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 165–171.
- Meutia, I., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 336– 352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Oliver, J. (2013). Sugiyono. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan BPJS Kesehatan No.2. (2015). Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang norma penetapan besaran kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Animal Genetics, 39(5), 561–563.
- Putri, R. S., & Sutrisno. (2018). AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 3, No 2, Nov 2018. 3(2), 116– 125.
- Soputan, R., Tinangon, J., & Lambey, L. (2018). Analisis Resiko Kecurangan terhadap Sistem Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di FKTP Pemerintah Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 9(2), 140–149. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i2.26469>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (S. Y. Suyandari (Ed.)). Alfabeta.
- Suryanto, Latif, M. A., & Sofyani, H. (2015). Penerimaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pusat Kesehatan Yang Baru Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 5(1), 657–672.
- Wijaya, A. M. E., Malau, M., & Tobing, E. G. M. (2016). PROSEDUR PERENCANAAN DAN ANGGARAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK – JAKARTA UTARA. 20(2), 11–15.
- Windiastruti, R. (2013). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 17(1), 1–18.